

Peran Australia Mewujudkan Komitmen Paris Agreement Untuk Adaptasi Iklim di Kiribati

Ainun Nur Baiti
Universitas Sriwijaya
ainb3204@gmail.com

Aurora Shafa Callista
Universitas Sriwijaya
callistashafaaurora@gmail.com

Putri Marlen Tambunan
Universitas Sriwijaya
putritbn16@gmail.com

Rouli Triana Munthe
Universitas Sriwijaya
roulitrrianamunthe@gmail.com

Abstract - This journal is written using a descriptive qualitative research method that uses a case study approach, by examining the policies carried out, and how the form of bilateral cooperation carried out by Australia to support Kiribati in dealing with the effects of Climate Change. The results of this journal will show how the assistance provided by Australia can play an important role as a regional actor through building climate resilience infrastructure, supporting the "Migration with Dignity" policy with the aim of preparing Kiribati people for possible migration due to climate change, and increasing human resource capacity. Australia's assistance includes building coastal resilience, skills training, strengthening the education sector, and providing basic services that are adaptive to climate change. This support not only helps Kiribati improve its adaptive capacity, but also strengthens both countries' commitment to implementing the Paris Agreement on Climate Adaptation. The journal attests to Australia's significant role in helping Kiribati meet the challenges of climate change and safeguarding its ecosystems and the well-being of its people.

Keywords: Paris Agreement, Climate Change, Australian Aid

Abstrak - Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menelaah kebijakan yang dilakukan, dan bagaimana bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan Australia untuk mendukung Kiribati menghadapi dampak Perubahan Iklim. Hasil dari jurnal ini akan menunjukkan bagaimana bantuan yang diberikan Australia dapat berperan penting sebagai aktor regional melalui pembangunan infrastruktur ketahanan iklim, mendukung kebijakan

"Migration with Dignity" Dengan tujuan mempersiapkan masyarakat Kiribati menghadapi kemungkinan migrasi akibat perubahan iklim, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bantuan yang diberikan Australia mencakup pembangunan ketahanan pesisir, pelatihan keterampilan, penguatan dalam sektor pendidikan, dan menyediakan layanan dasar yang adaptif bagi perubahan iklim. Tidak hanya membantu Kiribati dalam meningkatkan kapasitas adaptasi, dukungan ini juga telah memperluas komitmen yang dijalin kedua negara dalam pengimplementasian perjanjian Paris untuk adaptasi iklim. Jurnal ini membuktikan peran Australia terbukti secara signifikan dalam membantu Kiribati dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ekosistemnya dan mensejahterakan masyarakatnya.

Kata Kunci: Perjanjian Paris, Perubahan Iklim, Bantuan Australia

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 dilakukan survei rumah tangga di Kiribati, survei tersebut menyatakan 94 persen rumah tangga di Kiribati telah terkena dampak bencana alam 10 tahun sebelum survei dilakukan, 75 persen dari mereka mengatakan jika permukaan laut terus naik mereka perlu melakukan migrasi, migrasi dari pulau-pulau kecil ke pulau utama mengakibatkan kepadatan penduduk dan peningkatan angka pengangguran di pulau utama. telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan jumlah dan ukuran skema ketenagakerjaan terkhusus dengan Selandia Baru dan Australia. (IMF eLIBRARY, 2023)

Menurut (Bank Dunia, 2017) diperkirakan pada tahun 2040 yang akan datang biaya pembangunan tanggul laut dan peningkatan Pelabuhan untuk

perlindungan di pesisir Kiribati akan mencapai 54 Juta dolar atau setara dengan 11 persen PDB pertahun. Pemerintah Kiribati (GoK) bisa mendapat akses pendanaan bagi proyek iklim melalui sumbangan bilateral dari negara asing, dana iklim (CF), dan bank pembangunan multilateral (MDB) (Fouad et al, 2021). Bantuan bilateral eksternal terbesar yang diperoleh Kiribati berasal dari negara Australia, Uni Eropa, Jepang, dan Selandia Baru. Kiribati juga mendapatkan bantuan dana dari MDB dimana WD dan ADB menjadi penyumbang terbesarnya.

Dalam forum kepulauan pasifik yang dilaksanakan pada tahun 2016, Australia mengumumkan akan memberikan dukungan kepada Kawasan Asia Pasifik untuk mendukung perubahan iklim dan ketahanan sebesar 300 juta dolar selama empat tahun. Langkah ini menunjukkan bagaimana Australia berkomitmen dalam membantu masyarakat, Australia memiliki janji keuangan iklim senilai 1 miliar dolar janji ini dinyatakan pada tahun 2015 dalam pertemuan Paris Agreement, untuk mengatasi perubahan iklim Australia berfokus dalam hal peningkatan kapasitas negara untuk menanggapi pariwisata bencana, membangun ketahanan terhadap bencana yang disebabkan perubahan iklim, melakukan penelitian, dan mencari lebih lanjut informasi-informasi terkait perubahan iklim.

Langkah yang di ambil Australia ini sejalan dengan kerangka kerja dengan tujuan pembangunan regional di Kawasan Pasifik, para pemimpin dalam forum kepulauan Pasifik juga memberikan dukungan terhadap Langkah yang diambil Australia untuk mengatasi dan membangun ketahanan bencana akibat perubahan iklim. Di bawah kontribusi yang ditentukan secara nasional untuk konvensi kerangka kerja PBB terkait perubahan iklim, Australia berupaya dalam mendukung komitmen Kiribati. Kiribati merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana di dunia, dimana negara ini memiliki 33 pulau yang tersebar di 3,5 juta km (pangkat dua) Lautan, jika daratan negara ini di gabungkan luasnya hanya mencapai 811 km².

Kiribati secara internasional di akui menjadi negara yang sangat rentan dimana Sebagian besar daratannya berada kurang dari 2 Meter di atas permukaan laut dan atoll rata-rata memiliki lebar kurang dari 500 Meter, membuat Kiribati sangat rentan terhadap pasang surut dan badai laut. Perubahan iklim telah memberikan dampak nyata terhadap persediaan air tawar di Kiribati, mata pencarian masyarakat, Kesehatan, perikanan, terumbu karang, lahan pertanian, dan infrastruktur di wilayah pesisir. Diperkirakan situasi ini akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu dan akan memperparah tekanan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau, terkhusus di wilayah Tarawa Selatan.

Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yang memiliki fokus utama pada perubahan iklim akan menjadi dasar yang kuat dalam

mengintegrasikan risiko dan ketahanan perubahan iklim ke dalam sektor inti.

Australia memberikan bantuan dengan merancang dan membangun fasilitas sekolah yang dapat memperhitungkan banjir laut serta masalah kekurangan air tawar. Australia juga memberikan dana bantuan untuk perubahan iklim Kiribati dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sekitar 11,9 juta dolar, bantuan ini meliputi pembangunan infrastruktur, memberikan fasilitas dalam program peningkatan Pendidikan Kiribati, dan proyek perbaikan jalan Kiribati pada tahun 2011-2018 dengan dana sebesar 21,8 juta dolar. Untuk memberikan dukungan di bawah proyek adaptasi Kiribati (KAP) tahap III dalam meningkatkan ketahanan pesisir dengan membangun pekerjaan perlindungan garis Pantai di Lokasi prioritas di Tarawa Selatan, Australia memberikan bantuan sebanyak 5,9 juta dolar dari tahun 2010-2018.

Pada periode 2016-2010 Australia memberikan fasilitas ke Kiribati sebanyak 20 juta dolar untuk program keterampilan para pekerja, mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim ke dalam kebijakan praktik KIT, dan untuk meningkatkan kesadaran staf dan mahasiswa Institut Teknologi Kiribati (KIT) akan risiko iklim. Pada 2015-2016 sampai 2018-2019 Australia berkomitmen akan ikut membangun ketahanan bagi dampak perubahan iklim dengan memberikan dukungan kepada pemerintah Kiribati untuk membantu memberikan keterampilan serta mobilitas bagi tenaga kerja, pemberian layanan, fasilitas dan infrastruktur yang layak, memberikan dukungan bagi program perubahan iklim unggulan nasional (KAP III) dan untuk mengatasi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial yang mendesak.

Melalui program perubahan iklim regional Australia, Kiribati memperoleh keuntungan dengan total lebih dari 50 juta dolar. Adapun tujuan dari program yang di jalankan oleh Australia ini yaitu untuk mengukur kenaikan permukaan air laut dan membangun kapasitas layanan meteorologi nasional melalui program dukungan iklim dan kelautan di Pasifik. Meningkatkan informasi terkait iklim agar dapat mengambil Keputusan, meningkatkan akses, meningkatkan pengetahuan manajemen melalui program iCLIM. Mendukung negara-negara kepulauan Pasifik seperti Kiribati untuk meningkatkan akses keuangan untuk masalah iklim melalui organisasi pembangunan Jerman (GIZ). Dan untuk memberikan dukungan secara teknis dalam menyuarkan perubahan iklim di seluruh program mereka.

Australia telah berkomitmen akan memberikan dana bantuan sebesar 5 juta dolar untuk sistem peringatan dini global dan sistem risiko iklim guna memperkuat Pusat Meteorologi khusus regional agar dapat mempermudah penyediaan layanan ke seluruh negara yang berada di kepulauan Pasifik. Australia juga berkontribusi dalam mekanisme keuangan iklim secara global, seperti dana iklim hijau senilai 200 juta dolar dan fasilitas lingkungan global senilai 93 juta dolar.

Dana ini berguna untuk mendukung berbagai proyek pengurangan emisi di Kawasan Pasifik dan proyek pembangunan ketahanan. (Department of Foreign Affairs and Trade, 2018)

Pada saat konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP27) 2022, Presiden Kiribati melakukan pidato terkait biaya yang dibutuhkan untuk mempertahankan mata pencarian di Kiribati untuk mengatasi dampak perubahan iklim telah melewati batas kemampuan mereka. Hadirnya Kerjasama internasional bukan hanya untuk mendukung pengimplementasian Perjanjian Paris namun juga untuk memberikan dukungan finansial melalui berbagai mekanisme pendanaan secara bilateral maupun multilateral, atau bisa juga melalui dana Iklim dimana hal ini sangat penting dalam membantu Kiribati untuk mengatasi ancaman iklim yang sudah terjadi secara nyata di sana. (IMF eLIBRARY, 2023)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan lebih mendalam sesuai topik dari peran yang di ambil Australia dalam membantu Kiribati mengatasi permasalahan iklim dengan implementasi dari Paris Agreement. Penulis menemukan beberapa kekosongan dalam gap masalah yang telah diteliti dari penelitian terdahulu terkait perubahan iklim. Tinjauan pustaka menggunakan konsep adaptasi iklim dari Australia dan Kiribati dalam hubungan bilateral mereka.

Adaptasi Iklim diartikan sebuah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap sistem iklim yang mengalami perubahan, hal tersebut dapat berupa mengurangi resiko perubahan Iklim. Menurut Panel on Climate Change (IPCC), 6 laporan mengenai dampak Iklim, adaptasi, dan kerentanan. Seperti perubahan iklim yang meluas bahkan semakin parah dari perkiraan awal. Terjadi perubahan iklim yang memburuk bahkan diluar dari kendali manusia dan tidak terkontrol. Besarnya resiko yang muncul naik cepat dengan suhu yang meningkat dan perubahan iklim yang tidak bisa dipulihkan. Konflik yang menimbulkan hambatan dalam pembangunan dalam menghindari kerentanan resiko perubahan iklim. Sehingga adaptasi dibutuhkan dengan solusi yang bisa diimplementasikan hingga menyebar sampai ke masyarakat yang rentan (Levin, dkk. 2022). Dalam hal inilah, Paris Agreement dibentuk dan disepakati bersama oleh aktor internasional.

Paris Agreement ialah perjanjian internasional yang telah mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim, sejak diadisi oleh lebih dari 190 negara pada konferensi iklim PBB di Paris, Perancis tahun 2015. Tujuan dari keberadaan Paris Agreement ini untuk menahan naiknya suhu dari rata-rata global yang jauh dibawah 2°C dari tingkat pra-industri dengan mengupayakan pembatasan naiknya suhu hingga pada batas 1,5°C. Untuk memberikan batasan terhadap pemanasan global hingga pada batas yang disepakati, emisi dari rumah kaca harus melambat pada puncaknya

tahun 2025 dengan turun 43% tahun 2030. Ini sebuah tonggak penting bagi perubahan iklim dan beradaptasi pada dampak yang akan ditimbulkan (UNFCCC, .

Implementasi dari perjanjian ini membutuhkan transformasi dari segi ekonomi dan sosial. Dalam perjanjian, siklus 5 tahun aksi iklim yang meningkat dilakukan oleh negara. 2020, banyak negara yang melakukan pengajuan terhadap aksi iklim nasional mereka yang dikenal dengan Nationally Determined Contributions (NDC). Dalam perjanjian diberikan kerangka kerja dalam dukungan finansial, teknis, serta pengembangan kapasitas dari negara yang membutuhkan. Negara yang terbelakang maju diwajibkan untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara yang masuk kategori berkembang atau rentan, ini dilakukan untuk mendorong kontribusi sukarela ke pihak lain. Bantuan dana ini dibutuhkan untuk mitigasi dengan investigasi yang berskala besar demi mengurangi emisi gas.

Dalam hal ini Australia telah memberikan komitmen mereka terhadap masalah perubahan iklim dengan tujuan 0 emisi gas tahun 2050, mereka juga ingin mengurangi gas rumah kaca sebesar 43% dari 2005 hingga 2030. Dalam UU mereka, menerapkan otoritas perubahan iklim dengan saran mengenai rencana masa depan yang mengurangi emisi rumah kaca, sebagai bentuk komitmen mereka dengan kerangka kerja PBB dari konvensi UNFCCC tahun 2022. Pemerintahan Australia mendorong peningkatan adaptasi dalam perubahan iklim dan ketahanan bencana alam. Mereka menjadi negara pertama yang memiliki target emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara di G7 lainnya (Australian Office of Financial Management. 2024).

Perubahan Iklim ini tentu menjadi fenomena serius karena dampak yang diberikan bisa berbahaya bahkan sampai menghentikan laju produktivitas. Negara dengan daratan besar seperti Australia menjadi yang aktif dalam merespon hal ini. Sama hal yang dialami negara kecil yang ada di kawasan Pasifik, seperti Kiribati. Negara yang memiliki 120.000 penduduk yang titik tertinggi daratannya hanya kurang dari 4 meter dari permukaan laut. Perubahan iklim yang terjadi memberikan dampak buruk bagi kehidupan mental, fisik, dan kesehatan masyarakat. Seperti kekeringan berkepanjangan, kualitas dan ketersediaan air bersih, resiko penularan penyakit dari air yang tersedia, kesulitan penanaman buah dan sayur, tingginya konsumsi gula, lemak, dan garam sebagai pengganti buah-buahan, banyak masyarakat yang terkena penyakit jantung dan paru-paru akibat dari konsumsi makanan tidak sehat. WHO telah memberikan bantuan sebagai upaya memperkuat dan menahan kesehatan masyarakat dalam kondisi iklim yang memburuk. Sebesar US\$6, WHO melakukan proyek dengan Te Mamoauri 4 tahun untuk ketahanan iklim sistem kesehatan nasional (WHO, 2024).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan melakukan penemuan, pembuktian, serta pengembangan data terbaru yang belum pernah diketahui sebelumnya sesuai dengan sistematik kepenulisan ilmiah (Pahleviannur, 2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan objek, mengungkapkan makna dari sebuah fenomena, serta menjelaskan fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami suatu peristiwa ataupun fenomena menarik dalam konteks di kehidupan yang membuat penulis melihat dari sudut holistik dan merangkai kejadian menjadi satu fenomena yang utuh (Nurahma & Hendriani, 2021).

Fokus dari penelitian ini ada pada objek peran Australia dalam upayanya untuk mewujudkan komitmen mereka terhadap Paris Agreement kepada iklim yang ada di Kiribati. Melalui sumber data dari primer dan sekunder. Data primer dari web resmi pemerintahan yang terkait, lalu data sekunder berupa artikel, buku, laman berita, skripsi, jurnal, studi pustaka lainnya. Sumber data ialah subjek dimana data bisa didapatkan dengan sering kali melibatkan pengamatan terhadap objek tertentu. Sehingga dapatlah penulis untuk mengumpulkan semua data tersebut menjadi satu argumen utama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paris Agreement adalah perjanjian global yang ditandatangani oleh hampir keseluruhan dari negara di dunia dalam *Conference of Parties (COP21)* PBB pada tahun 2015 yang berlokasi di Paris, Prancis. Paris Agreement merupakan pilar penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi. *Paris Agreement* ini menekankan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2° C, dengan upaya maksimum membatasi hingga 1,5° C di tingkat pra-industri. Selain berfokus pada pengurangan risiko emisi gas rumah kaca, Paris Agreement juga menekankan akan pentingnya adanya adaptasi perubahan iklim, terkhusus untuk negara-negara berkembang yang rentan dan kepulauan-kepulauan kecil, seperti Kiribati. Salah satu prinsip yang mendasar dalam Paris Agreement adalah CBDR-CR; *common but differentiated responsibilities and respective capabilities*, yang dimana prinsip ini berarti walaupun seluruh negara mempunyai tanggung jawab terhadap perubahan iklim, negara-negara yang maju mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang rawan akan akibatnya.

Sebagai negara maju dan negara yang menandatangani Paris Agreement, Australia harus melaksanakan tanggung jawab tersebut, terutama dikarenakan posisinya yang ada pada kawasan Pasifik dengan kondisi memiliki banyak negara kepulauan kecil yang terdampak akan akibat dan ancaman dari perubahan iklim, seperti Kiribati. Akibat dari adanya komitmen oleh Australia dalam Paris Agreement ini

membuatnya harus berfokus pada pengurangan emisi domestik dan aktif berperan dalam kerjasama global dan bantuan bilateral yang memiliki fokus pada adaptasi dan ketahanan iklim. Dukungan yang mencakup berbagai sektor seperti pendanaan, transfer teknologi, membangun kapasitas, dan juga dukungan-dukungan kebijakan yang sifatnya strategis dan dalam jangka panjang.

Adanya kesadaran dari Australia terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim di negara-negara berkembang di Pasifik sejalan dengan adanya peningkatan urgensi internasional atas isu ini. Negara kecil seperti Kiribati menghadapi langsung implikasi oleh naiknya permukaan laut, kerusakan lingkungan, dan adanya peningkatan risiko bencana alam yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Dalam hal ini, Paris Agreement tidak hanya menjadi kerangka hukum atau politik global, akan tetapi sebagai pembentuk norma internasional yang baru dan mendorong negara-negara maju untuk memperluas makna dari solidaritas internasional.

Keikutsertaan Australia dalam hal ini merupakan cerminan dari interpretasi konkret akan Paris Agreement itu sendiri, di mana tanggung jawabnya tidak hanya berfokus pada usaha domestik, namun mengarah juga terhadap kontribusi aktif dalam memperkuat ketahanan komunitas yang ikut terkena dampaknya. Dalam berbagai forum internasional, pemerintah Australia menyuarakan akan pentingnya memberi dukungan pada negara-negara Pasifik dalam upayanya menghadapi tantangan dan ancaman dari perubahan iklim. Dukungan yang meliputi adanya kerja sama teknis, pendanaan di bidang infrastruktur, memperkuat sistem tata Kelola lokal, dan adanya program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas terhadap bencana iklim yang berbasis masyarakat. Ini sejalan dengan fokus utama dari Paris Agreement dalam penekanannya akan pentingnya *resilience building* dan pengurangan kerentanan lingkungan. Dengan demikian, Paris Agreement telah menjadi dasar khaidah praktis yang mendorong Australia dalam menjalankan tanggung jawabnya secara global agar lebih terarah dan konkret, salah satunya yang tercermin dalam perannya yang mendukung Kiribati.

Peran Australia Mendukung Adaptasi Iklim di Kiribati

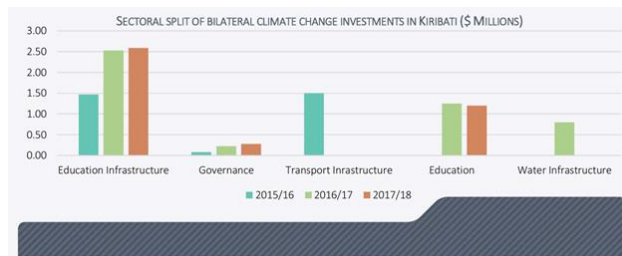
Australia telah dikenal secara luas sebagai salah satu negara yang aktif dan konsisten dalam menjalin serta memperkuat kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara yang berada di Kawasan Pasifik. Sebagai negara dalam Kawasan Pasifik yang secara geografis terletak di wilayah strategis, Australia memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan tersebut. Termasuk dari ancaman yang mungkin terjadi akibat dari perubahan iklim yang ekstrem. Kepentingan ini tidak hanya didasari oleh pertimbangan ekonomi

atau politik semata, tetapi juga mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan yang kian hari kian mendesak.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang sangat serius, dan negara-negara di kawasan Pasifik merupakan salah satu yang paling rentan terhadap dampaknya. Negara-negara kepulauan kecil seperti Kiribati, Tuvalu, dan Fiji menghadapi ancaman nyata dari kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan degradasi lingkungan yang signifikan. Dalam konteks ini, Australia tidak tinggal diam. Sebaliknya, Australia justru tampil sebagai salah satu mitra utama yang memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut, baik melalui bantuan teknis, pendanaan, maupun kerja sama strategis dalam pengembangan kebijakan dan program-program adaptasi perubahan iklim.

Keterlibatan Australia di kawasan tidak hanya terbatas pada pernyataan-pernyataan politis mereka di forum internasional, melainkan telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan program kerja sama yang berkelanjutan. Pemerintah Australia, melalui kebijakan luar negerinya, telah menargetkan lebih dari 26 negara di Kawasan Asia Pasifik sebagai bagian dari komitmen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari keseluruhan negara yang telah ditargetkan tersebut, setidaknya 20 negara telah menerima bantuan langsung dari Australia dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan iklim, meningkatkan kapasitas nasional dalam merespons bencana alam, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan secara lokal. Bentuk bantuannya pun beragam, mulai dari pendanaan proyek energi terbarukan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pelatihan teknis untuk pemerintah lokal, hingga pendampingan dalam penyusunan kebijakan nasional yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Upaya ini tidak hanya mencerminkan pendekatan pragmatis dalam menjalin hubungan internasional, tetapi juga menunjukkan wajah Australia sebagai negara yang memiliki komitmen moral dan etika dalam mendukung negara-negara tetangganya yang sedang menghadapi tantangan berat akibat perubahan iklim. Di mata komunitas internasional, kiprah Australia ini telah mendapat sorotan dan apresiasi tersendiri karena dinilai mampu menjembatani kepentingan nasionalnya dengan kebutuhan kolektif kawasan. Bahkan dalam berbagai forum internasional seperti COP (*Conference of the Parties*) dan pertemuan G20, Australia secara konsisten menyuarakan pentingnya kolaborasi regional dan global dalam menangani isu perubahan iklim secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Dundas, 2023).



Gambar 1. Pembagian Sektoral Investasi Perubahan Iklim Bilateral di Kiribati sumber : *Evaluation of Australia's climate change assistance: Final report*

Kepada Kiribati, misalnya, Australia menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten dalam mendukung negara kecil di Pasifik tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kiribati menjadi salah satu dari 14 negara prioritas yang masuk dalam daftar penerima utama bantuan luar negeri Australia dari total 26 negara. Posisi Kiribati yang masuk ke dalam daftar prioritas bukan tanpa sebab, kedua negara ini telah lama menjalin kedekatan historis, geografis, dan strategis. Hubungan diplomatik resmi antara Australia dan Kiribati sendiri telah dimulai sejak Kiribati merdeka pada tahun 1979, dan sejak saat itu, Australia telah menjadi salah satu mitra bilateral paling penting bagi Kiribati dalam berbagai sektor pembangunan.

Kerja sama ini tidak terbatas hanya pada aspek formal kenegaraan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Australia, melalui berbagai inisiatif seperti Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP), secara aktif terlibat dalam mendanai dan mendukung proyek-proyek infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan dan ketahanan Kiribati, baik itu dalam bentuk pembangunan pelabuhan, jaringan listrik berbasis energi terbarukan, hingga sistem pengelolaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Selain infrastruktur, Australia juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung Kiribati dalam menghadapi krisis perubahan iklim yang menjadi ancaman eksistensial bagi negara kepulauan dataran rendah ini. Dengan sebagian besar wilayahnya berada hanya beberapa meter di atas permukaan laut, Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, abrasi pantai, intrusi air laut ke dalam air tanah, serta cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam menghadapi ancaman tersebut, Australia telah menunjukkan dukungan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga substantif. Sebagai penyumbang utama bantuan pembangunan bagi Kiribati, Australia menyalurkan dana, keahlian teknis, serta dukungan kebijakan untuk memperkuat kapasitas Kiribati dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Bentuk dukungan ini antara lain:

Bantuan Akses Layanan Air Bersih dan Sanitasi

Layanan air bersih dan sanitasi adalah salah satu hal yang krusial dalam kehidupan sehari-hari, adanya keterbatasan dalam hal ini dapat menyebabkan masalah yang serius bagi sebuah negara. Namun, terdapat negara-negara yang kehilangan akses ke layanan air bersih dan sanitasi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti bencana alam, perubahan iklim, atau adanya ketidakstabilan kondisi geopolitik yang berdampak pada kericuhan dan berkurangnya akses layanan ke air bersih dan sanitasi.

Menurut WHO, terdapat setidaknya dua pertiga negara di dunia yang melaporkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan air minum, sanitasi, dan kebersihan (WASH) yang responsif terhadap dampak perubahan iklim, sementara lebih dari 75% negara mengalami kekurangan dana untuk menjalankan rencana WASH mereka. Hal itu dikarenakan sebanyak 90% bencana yang terjadi karena perubahan iklim berkaitan dengan sistem perairan seperti banjir, kekeringan, dan siklon, yang secara langsung mengancam ketersediaan air bersih dan layanan sanitasi. Saat ini, sekitar 4 miliar orang mengalami stres air ekstrem setidaknya selama sebagian tahun, yang memperburuk kesulitan akses air bersih dan sanitasi. Dengan kata lain, sebagian besar negara di dunia menghadapi kesulitan akses layanan air bersih dan sanitasi akibat dampak perubahan iklim, khususnya negara yang rentan terhadap bencana iklim. Data dari lebih 120 negara menunjukkan bahwa masalah ini sangat meluas dan memburuk akibat frekuensi dan intensitas bencana iklim yang meningkat.

Kiribati merupakan salah satu negara yang berpotensi tinggi terancam kesulitan layanan air bersih dan sanitasi. Dikarenakan letak geografisnya, beberapa wilayah di Kiribati kerap terdampak gelombang badai serta berbagai dampak buruk akibat perubahan iklim, salah satunya Terawa Selatan. Kiribati sangat rentan terhadap perubahan indeks *El Niño Southern Oscillation* atau ENSO, ENSO sendiri merupakan fenomena alam berupa fluktuasi suhu muka laut di sekitar bagian tengah dan timur ekuator Samudera Pasifik yang berinteraksi dengan perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Saat memasuki El Niño, limpasan hujan merupakan bagian air hujan yang masuk dan mengalir dan masuk dalam badan sungai (Anggrainy, 2015). Limpasan ekstrem inilah yang kemudian mencemari sumber air tawar. Sedangkan pada saat La Niña, curah hujan menjadi berkurang sampai di titik terjadinya kekeringan, meningkatkan salinitas atau keasinan waduk air tawar dan membuat sumur-sumur menjadi payau. Selanjutnya hal ini berakibat pada berkurangnya sumber air ledeng di Terawa Selatan.

Australia bekerjasama dengan pemerintah Kiribati untuk meningkatkan pasokan air minum, dengan adanya kerjasama ini, Kiribati mendapatkan dukungan untuk dapat menerapkan adaptasi prioritas seperti pada saat kekurangan jumlah air diakibatkan ENSO (Government of Kiribati, 2023). Tidak hanya

melalui dukungan moril, tetapi juga dukungan finansial. Australia telah memberikan dana sebanyak sekitar US\$4,85 juta untuk pendanaan KAP, sebuah program yang dirancang guna mengurangi kerentanan Kiribati terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Program ini mencakup peningkatan persediaan air bersih, perbaikan sumur sederhana, pengelolaan zona pesisir, dan perlindungan infrastruktur publik yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. KAP juga melibatkan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengelolaan risiko bencana alam. Tidak hanya itu, Australia juga turut memberikan proyek prioritas yang didesain untuk memperbaiki sistem distribusi air di Kiribati, khususnya pada wilayah yang rentan mengalami kekeringan. Proyek ini termasuk juga Pembangunan infrastruktur air yang memadai yang dapat mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat Kiribati.

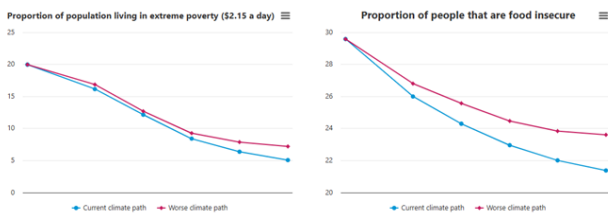
Hingga saat ini, data yang dirilis The Pacific Community menunjukkan bahwa persentase masyarakat di Kiribati yang memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola dengan aman sebanyak 76%, sumber daya yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan ini masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kiribati. Meskipun data menunjukkan angka yang cukup besar yakni diatas 50% faktanya masih banyak masyarakat yang tidak terjangkau akses layanan air minum dengan aman. Oleh karena itu upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang di negara tersebut dapat mengandalkan sumber air yang aman dan berkelanjutan.

Pendekatan Inklusif dan Responsif Terhadap Golongan Rentan

Perubahan iklim memberikan dampak sangat buruk pada golongan rentan yang telah termarginalisasi sejak awal seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Secara umum, golongan rentan dalam konteks perubahan iklim adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terdampak negatif akibat perubahan iklim karena keterbatasan kapasitas adaptasi, kondisi sosial-ekonomi, atau faktor fisik dan demografis tertentu. Mereka lebih mudah mengalami kerugian dan kesulitan dalam menghadapi dampak perubahan iklim seperti bencana alam, kekeringan, banjir, dan gangguan mata pencaharian.

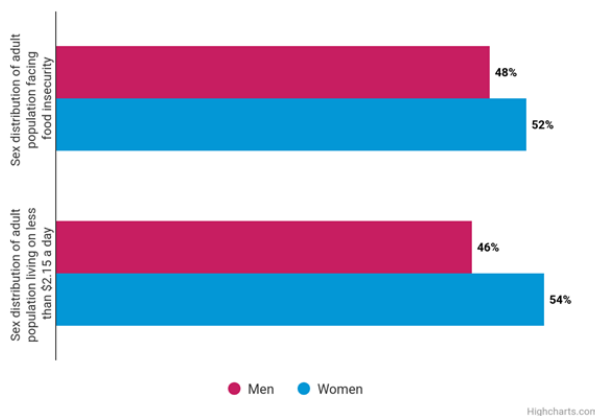
Definisi golongan rentan lebih jauh lagi, menurut pernyataan dari metodologi Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA), kerentanan terhadap perubahan iklim merupakan sebuah kondisi di mana suatu sistem (komunitas, rumah tangga, atau individu) tidak mampu menghadapi dampak buruk perubahan iklim, yang dipengaruhi oleh tingkat paparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptasi. Sedangkan menurut WHO, kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana,

yang sangat berisiko mengalami dampak kesehatan akibat perubahan iklim.



Gambar 2. Populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dan mengalami kerawanan pangan. Sumber : UN Women. (2025). Kiribati.

Perubahan iklim yang semakin ekstrem telah menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang dan wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap bencana alam seperti di Kiribati. Fenomena seperti kekeringan berkepanjangan, banjir besar, badai tropis yang lebih sering dan dahsyat, serta naiknya permukaan air laut telah merusak sistem pertanian, mengganggu rantai pasok pangan, menghancurkan mata pencaharian, serta memaksa jutaan orang untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka yang tidak lagi layak huni. Dampak ini paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori rentan yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk beradaptasi atau memulihkan diri dari krisis.



Gambar 3. Skenario saat ini dan skenario terburuk kemiskinan dan rawan pangan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Sumber : UN Women. (2025). Kiribati

Jika perubahan iklim terus meningkat, jumlah perempuan dewasa (15+) yang hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 7,9 ribu dan yang mengalami kerawanan pangan diperkirakan meningkat menjadi 13,5 ribu. Angka yang sesuai untuk pria dewasa (15+) adalah 6,7 ribu dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan 12,4 ribu menghadapi kerawanan pangan. Australia memiliki komitmen untuk melakukan pendekatan inklusif dan responsif terhadap golongan rentan dengan mengupayakan program yang lebih baik. Salah satunya melalui Pacific Women Lead (PWL), melalui PWL, pemerintahan Australia mendukung

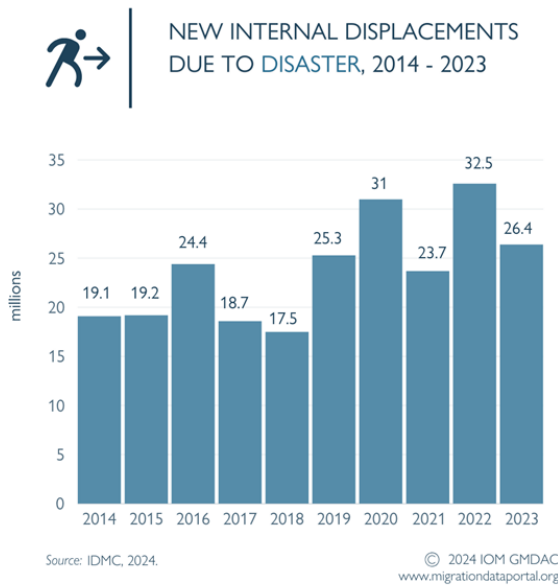
Women's Disaster Resilience (WRD) dengan memberikan bantuan dukungan finansial sebanyak AUD13,5 juta selama tahun 2021-2025 kepada Kiribati untuk mengadopsi sistem pengambilan keputusan dan tata kelola yang responsif gender dan memungkinkan adanya tindakan yang ditargetkan untuk membangun ketahanan perempuan serta anak perempuan terhadap bencana dan ancaman saat ini dan masa depan, termasuk perubahan iklim (Government of Kiribati, 2023). Melalui PWL juga, Australia telah mendukung berbagai program yang memungkinkan perempuan, anak-anak, serta golongan rentan untuk tetap menjadi bagian prioritas dalam bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim serta bagaimana adaptasi yang diperlukan.

Dukungan Migrasi

Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang mendorong adanya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya, hal ini dilakukan karena adanya insting bertahan hidup yang terdapat di diri individu. Pada 2018, World Bank memprediksi setidaknya ada 143 juta jiwa dapat terpaksa bermigrasi pada tahun 2050 akibat perubahan iklim, dengan sekitar 24,9 juta orang sudah mengungsi pada 2019 karena bencana terkait perubahan iklim di 140 negara. Migrasi ini tidak hanya dilakukan oleh para orang dewasa, lansia bahkan anak-anak pun terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya dikarenakan perubahan iklim ekstrem yang tidak memungkinkan untuk mereka tetap menetap di sana. Khususnya perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki kapasitas untuk dapat beradaptasi baik dengan perubahan iklim serta lingkungan di sekitarnya yang perlahan mulai berubah juga. Hal ini kemudian menciptakan efek domino. Efek domino sendiri adalah reaksi berantai yang dipicu oleh suatu kejadian awal. Peristiwa kecil dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, atau lingkungan. Biasanya efek domino ini akan menyebabkan satu kerusakan berujung kepada kerusakan lainnya.

Dalam konteks ini, pemanasan global yang memicu perubahan iklim ekstrem berdampak pada rusaknya lingkungan serta terancamnya kehidupan masyarakat di negara-negara kecil seperti Kiribati. Berbagai bencana alam yang datang akibat perubahan iklim yang tidak stabil ditambah ketinggian permukaan laut yang terus meningkat menciptakan kerawanan pangan, kemiskinan, kesulitan akses ke air bersih, dan lainnya. Hal ini membuat masyarakat Kiribati cenderung memilih pindah ke negara dengan kondisi iklim yang lebih stabil, kemudian lonjakan migran dari Kiribati ke negara-negara lain dapat terjadi, muncul lah masalah lainnya yakni krisis pengungsian. Untuk mengatasi terjadinya ini semua, pemerintahan Kiribati tidak tinggal diam dan berusaha mengajak negara lain bekerjasama untuk membantu negaranya, Australia menjadi salah satu negara yang dengan senang hati telah bekerjasama dengan Kiribati untuk menangani

dampak ini.



Gambar 4. Data pengungsian internal akibat bencana sumber : Environmental Migration

Perubahan iklim ekstrem ini tidak hanya berita yang tersebar di sosial media atau semacanya karena faktanya, pada tahun 2016 terdapat 81% rumah tangga di Kiribati telah merasakan dampak akibat air laut yang terus meninggi (Doctors Without Borders, 2022). Tidak hanya itu, anak-anak dan generasi muda mulai dilanda kecemasan akibat perkiraan bahwa negara mereka akan tenggelam. 90% dari mereka ingin bermigrasi sebagai respon terhadap perubahan iklim yang ekstrim dan ketidakpastian. Hingga saat berlangsung Sidang Umum PBB ke-63 di New York, Presiden Kiribati Anote Hong berinisiatif untuk meresmikan kebijakan Migration With Dignity (MWD) sebagai respon terhadap berbagai ancaman yang diakibatkan perubahan iklim. Kebijakan ini bertujuan untuk membekali masyarakat Kiribati pendidikan yang berkualitas serta kualifikasi pekerjaan agar masyarakat Kiribati dapat beradaptasi dengan kehidupan mereka lebih baik daripada sebelumnya, dengan mempermudah akses migrasi ke negara lain seperti Selandia Baru maupun Australia (McClain & et al, 2022).

Jumlah populasi di Kiribati yang semakin hari semakin meningkat dengan dibarengan perubahan iklim yang mengkhawatirkan, termasuk pertambahan ketinggian permukaan laut semakin mendorong Kiribati untuk semakin serius dalam mengimplementasikan program MWD kepada masyarakatnya. Fokus dari MWD sendiri yang paling disorot adalah mengasah kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Kiribati agar nantinya tidak kesulitan saat bermigrasi ke negara dengan mayoritas penduduk berbahasa Inggris, hal itu dikarenakan di Kiribati sendiri bahasa yang mereka gunakan adalah Gilbertese.

Meskipun kebijakan ini baru saja diresmikan pada tahun 2008, kerjasama Kiribati dan Australia dalam mendukung kebijakan ini telah terjalin sejak 2006 melalui peluncuran Kiribati Australian Nursing Initiative (KANI). Program ini terjalin hingga 2014 dan selama itu Australia telah menghabiskan dana sebanyak AUD20,8 juta. Dari program ini, baik perempuan maupun laki-laki remaja di Kiribati mendapatkan beasiswa untuk menerima pelatihan perawatan di Universitas Griffith, Brisbane, sebuah universitas teratas di dunia dengan 50.000 mahasiswa yang tersebar di enam kampus di Queensland Tenggara, Australia. Mereka yang menyelesaikan pendidikan melalui KANI akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Australia dan Selandia Baru.

KESIMPULAN

Australia berperan penting dalam mendukung implementasi Paris Agreement untuk adaptasi dan perubahan iklim di Kiribati melalui beberapa inisiatif yang strategis, Adapun bantuan yang diberikan Australia seperti bantuan Pendidikan, peningkatan kapasitas, dan bantuan Pendidikan kepada Kiribati yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti krisis air bersih dan kenaikan permukaan air laut. Dukungan yang diberikan Australia seperti pelatihan keterampilan masyarakat, program beasiswa dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lokal, serta melalui pendanaan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Australia juga menekankan pendekatan inklusif dengan melibatkan kelompok yang rentan seperti penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program adaptasi, dan kelompok rentan seperti Perempuan.

Dukungan terhadap kebijakan migrasi terencana Kiribati merupakan salah satu inovasi penting, dimana kebijakan ini mencakup program pelatihan keterampilan dan skema visa kerja khusus bagi warga Kiribati di Australia, dengan tujuan sebagai alternatif adaptasi jangka Panjang. Meskipun dukungan-dukungan yang diberikan oleh Australia kepada Kiribati. Namun, Tantangan masih ditemukan seperti Kiribati menjadi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dan Kiribati perlu meningkatkan transfer

Population History of Kiribati

Year	Population (01 Jan)	Natural Change	Growth Rate (%)	Total Population (31 December)
2024	133,527	1,967	1.473%	135,494
2023	131,534	1,978	1.504%	133,512
2022	129,403	2,113	1.633%	131,516
2021	127,351	2,035	1.598%	129,386
2020	124,847	2,479	1.986%	127,326
2019	122,994	1,839	1.495%	124,833
2018	121,173	1,808	1.492%	122,981
2017	119,376	1,783	1.494%	121,159
2016	117,580	1,783	1.516%	119,363
2015	116,050	1,520	1.31%	117,570

Gambar 5. Sejarah Populasi di Kiribati. Sumber : Kiribati

teknologi serta koordinasi program. Jurnal ini telah membuktikan peran Australia telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan Kiribati terhadap perubahan iklim, meskipun efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada keberlanjutan komitmen, kolaborasi yang lebih erat, dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

sebanyak AUD20,8 juta. Dari program ini, baik perempuan maupun laki-laki remaja di Kiribati mendapatkan beasiswa untuk menerima pelatihan perawatan di Universitas Griffith, Brisbane, sebuah universitas yang menyandang peringkat 2 persen universitas teratas di dunia dengan 50.000 mahasiswa yang tersebar di enam kampus di Queensland Tenggara, Australia. Mereka yang menyelesaikan pendidikan melalui KANI akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Australia dan Selandia Baru.

REFERENSI

- [1]Analytics, R. H. (2021). *Implementing the Paris Agreement in the Caribbean*. Karibati.
- [2]Anggrainy, F. (2015). *Limpasan air hujan dan pengukurannya*. SlideShare.
- [3]Australia. (2021). *Komitmen Australia terhadap Aksi Perubahan Iklim di Kiribati*. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
- [4]Australia. (n.d.). *Australia's Commitment To Climate Change Action in Kiribat*. Departmen of Foreign Affairs and Trade.
- [5]Dr. Nursapia Harahap, M. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: h Wal ashri Publishing.
- [6]Dundas, K. (2023). *COP28 – What is on the agenda and what is Australia hoping to achieve?* Global Compact Network Australia.
- [7]Dunia, B. (2017). *Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana. Makalah Latar Belakang Pacific Possible No. 6*. Washington, DC: Grup Bank Dunia.
- [8]Fouad, M. N. (2021). *Pembiayaan Iklim bagi Negara-negara Kepulauan Pasifik*. Washington, DC: Dana Moneter Internasional.
- [9]Gumilang, N. A. (n.d.). *Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya*. Gramedia Blog.
- [10]Julian Gayfer, K. S. (2018). *INVESTING IN THE FUTURE*. Canberra: e Department of Foreign Affairs and Trade.
- [11]Karibita, G. o. (2015). *DEVELOPMENT COOPERATION POLICY*. Karibita: Government of Kiribati.
- [12]Kelly Levin, S. B. (2022). *6 Temuan Besar dari Laporan IPCC 2022 tentang Dampak Iklim, Adaptasi, dan Kerentanan*. From WRI Indonesia: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/6-temuan-besar-dari-laporan-ipcc-2022-tentang-dampak-iklim-adaptasi-dan-kerentanan>
- [13]Kim, H. (2024). *Countering the climate crisis in Kiribati*. World Health Organization.
- [14](2022). *Kiribati: Di mana krisis iklim dan kesehatan masyarakat tidak sejalan*. Medecins Sans Frontiers Doctors Without Borders.
- [15]Management, e. A. (2024). *Australian Government Climate Change Commitments*. Australia Governement.
- [16](2021). *Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim*. World Health Organization.
- [17]Munjin Syafik, d. (2022). Australia's Role in Supporting Kiribati's Migration with Dignity Policy Dealing with. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* , V. 4(1).
- [18]Noumea. (2025). *Stat of the week: In Kiribati, 76% of the population has access to safely managed drinking water services, a crucial resource for health and well-being*. Karibati: Pasific Community.
- [19]Pacific, A. I. (n.d.). *The republic of Kiribati is an independent country comprising 33 atolls in three main groups running 4,000 kilometres along the equator. Kiribati's EEZ is the largest in Micronesia*. Australia Government.
- [20](2015). *Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- [21]Shanna N. McClain, d. (2022). Migration with Dignity: A Legal and Policy Framework. *Journal of Disaster Research*, V.17 (3).
- [22]Trade, D. o. (2024). *Kiribati Development Cooperation Factsheet*. Australia Government.
- [23]Trade, D. o. (n.d.). *Kiribati - Australia's commitment to strengthening climate and disaster resilience in the Pacific*. Australia Government.
- [24]UNFCCC. (n.d.). *The Paris Agreement*. United Nations Climate Change.
- [25]Yusuf, M. A. (2024). *Kerja Sama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh*. Gramedia Blog.